



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Siliwangi 355 – 357 Semarang 50146 Telepon 024-7604640, 7605660, 7605700
Faksimile 024-7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : perhubungan@jatengprov.go.id

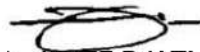
URUSAN PEMERINTAHAN	:	Wajib Non Pelayanan Dasar
Dinas / Balai / Cabang	:	Sekretariat - Dinas Perhubungan
Tujuan, Indikator dan Target	:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis Di Dinas Perhubungan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan sebesar 85,15 %
Sasaran, Indikator dan Target	:	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perhubungan sebesar 81,6%
Program, Indikator dan Target	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah sebesar 100%
A. Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
B. Sasaran Kegiatan	:	Seluruh pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
C. Indikator dan Output Kegiatan	:	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun
• Sub Kegiatan	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1. Indikator dan Output	:	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebesar 300 orang
2. Lokasi	:	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
• Sub Kegiatan	:	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1. Indikator dan Output	:	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN sebanyak 12 dokumen
2. Lokasi	:	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
• Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1. Indikator dan Output	:	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah sebanyak 12 dokumen
2. Lokasi	:	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
D. Latar Belakang	:	Aparatur Sipil Negara adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam rangka menyelenggara-

	kan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme setiap ASN memiliki kewajiban dan hak salah satunya berupa Gaji dan Tunjangan ASN. Pengelolaan keuangan perlu dilaksanakan dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan pengelola keuangan. Dengan demikian pelaksanaan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD dapat dilaksanakan dengan baik. Setiap ASN berhak memperoleh honorarium yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Sehingga selama memangku tugas pengelola keuangan berhak diberikan honorarium sebagaimana mestinya. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Sub Bagian Keuangan. Selama ini masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses penatausahaan keuangan antara lain kesalahan input pada aplikasi GRMS, kesalahan pemotongan/pemungutan pajak, serta kurang tertib dan lengkapnya berkas SPJ. Guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah diperlukan koordinasi dan monitoring secara berkala, dan sesuai kebutuhan dalam penatausahaan keuangan pada secretariat, bidang dan balai di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan dengan adanya koordinasi tersebut dapat tersosialisasinya perubahan peraturan penatausahaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kasir Penerimaan, dan Kasir Pengeluaran dapat mahir dalam menjalankan aplikasi GRMS sehingga tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan, dan adanya pemahaman peraturan perpajakan yang baik sehingga tidak terjadi kesalahan pemotongan dan/atau pemungutan pajak. Dengan demikian, dapat tersaji laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan akuntabel.
E. Lingkup Kegiatan	: 1. Maksud : Terpenuhinya Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah - Tujuan : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah 2. Mekanisme/ metode pelaksanaan kegiatan : Swakelola 3. Kebutuhan Waktu : 1 Tahun Anggaran 4. Siapa yang terlibat : Seluruh Pengelola Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 5. Foto-foto pendukung : -

F. Anggaran	:	Tahun 2026 : Rp46.794.366.000 Tahun 2027 : Rp50.688.719.000 Tahun 2028 : Rp52.108.469.000
G. Rencana Anggaran Biaya (Format Terlampir)		RAB disusun per sub kegiatan sesuai dengan Lampiran
H. Penutup	:	-

Semarang,

Pengguna Anggaran,



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA
NIP. 19660801 199603 1 004